BPP MHKP
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2026

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke



2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke dapat disusun.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada Stasiun PPMHKP Merauke selama periode Juli sampai dengan September 2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terhadap data capaian beberapa indikator kinerja yang masih dalam proses pengukuran. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan penyelenggaraan kinerja pada masa yang akan datang.

Merauke, 10 Oktober 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

(Somingan, S.ST.Pi)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun PPMHKP Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Merauke melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Sampai dengan akhir September 2026, realisasi anggaran mencapai Rp2.265.705.052 atau 63,54%. dari total pagu Rp3.565.698.000.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, implementasi sistem jaminan mutu, serta dukungan manajemen dan operasional perkantoran.Analisis kinerja dalam laporan ini menempatkan realisasi anggaran sebagai data dukung pelaksanaan kegiatan, pengukuran output indikator. Beberapa kegiatan yang tercatat antara lain Inspeksi SKP, Surveilen HACCP, INPRES, Surveilen CPIB Kapal, CBIB, CPIB Benih dan dukungan manajemen.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. LKj Triwulan III Tahun 2026 disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan kinerja Stasiun PPMHKP Merauke sampai dengan periode pelaporan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pelaksanaan kinerja, mengevaluasi perkembangan pencapaian target, mengidentifikasi kendala, dan menyediakan bahan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja.

1.3 Dasar Hukum

• Peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

• Ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pengelolaan kinerja dan pelaporan kinerja.

• Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026 beserta revisi tanggal 17 Juni 2026.

1.4 Tugas dan Fungsi

Stasiun PPMHKP Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

a. Pelaksanaan sertifikasi mutu hasil perikanan;

b. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;

c. Pengujian laboratorium;

d. Pelaksanaan sistem jaminan mutu;

e. Pelayanan publik;

f. Pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

1.5 Struktur Organisasi



1.6 Sistematika Penyajian

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkanmemiliki indikator yang terukur

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Revisi tanggal 17 Juni 2026 digunakan sebagai dasar penetapan target dalam laporan ini.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai) * B. Pasca Panen (Domestik)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks))	82,5
		6	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	77
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	77
		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)	89

2.2 Anggaran

Total pagu anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2026 sebesar Rp3.482.698.000, terdiri atas Dukungan Manajemen sebesar Rp3.297.717.000, Pengendalian dan Pengawasan Mutu sebesar Rp111.981.000, dan Manajemen Mutu sebesar Rp73.000.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian indikator Triwulan II seharusnya dihitung berdasarkan realisasi output sampai dengan 30 Juni 2026. FA Detail yang tersedia dalam bahan penyusunan merupakan laporan periode Agustus 2026. Oleh karena itu, angka realisasi Agustus tidak digunakan sebagai capaian Triwulan II.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72	67,50	65	65,83
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72	76,85	62,50	72,47
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai) * B. Pasca Panen (Domestik)	71	0	75	0
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72	0	76,03	0

SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks))	82,5	0	77,75	0
		6	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	77	0	0	0
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	86,2	0	0	0
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Persen)	86	100	100	100
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	92,1	0	93,19	0
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	71,75	0	0	0
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	77	100	100	100
		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)	89	3,86	90,15	95,83

3.2 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Realisasi Anggaran

Program	Pagu Revisi	Realisasi s.d. Sept.	Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp184.981.000	Rp80.998.439	43,79%	Rp103.982.561
Program Dukungan Manajemen	Rp3.380.717.000	Rp2.184.706.613	64,62%	Rp1.196.010.387
Jumlah	Rp3.565.698.000	Rp2.265.705.052	63,54%	Rp1.299.992.948

3.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut

Kendala:

- Sebagian indikator memerlukan akumulasi data semesteran dan tahunan.
- Keterbatasan jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan teknis.

Upaya:

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis pada Triwulan III.

.

3.4 Realisasi Anggaran

Berdasarkan FA Detail periode September 2026, pagu revisi SPPMHKP Merauke sebesar Rp3.565.698.000. Realisasi sampai dengan 30 September 2026 mencapai Rp2.265.705.052 atau 63,54% dari pagu, dengan sisa anggaran Rp1.299.992.948. Tidak terdapat pagu yang sedang dikunci (lock pagu) pada saat laporan diterbitkan.

Uraian	Nilai
Pagu revisi TA 2026	Rp3.565.698.000
Realisasi sampai dengan September 2026	Rp2.265.705.052
Persentase realisasi	63,54%
Sisa anggaran	Rp1.299.992.948
Lock pagu	Rp0

3.5 ANALISIS DAN EVALUASI

A. Capaian

- Pagu revisi dan realisasi kumulatif telah teridentifikasi secara rinci sampai dengan level program, kegiatan, output, komponen, akun, dan item belanja melalui FA Detail.
- Realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai 63,54% dari pagu revisi.
- Program Dukungan Manajemen mencatat tingkat penyerapan 64,62%, sedangkan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mencatat 43,79%.
- Tidak terdapat lock pagu pada data FA Detail periode September 2026.

B. Hal yang Memerlukan Perhatian

Pada akhir Triwulan III, penyerapan anggaran secara keseluruhan masih sebesar 63,54%, sehingga diperlukan pengendalian pelaksanaan dan penjadwalan kegiatan yang lebih ketat pada Triwulan IV. Sisa anggaran terbesar secara nominal berada pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.196.010.387, sedangkan secara proporsional penyerapan terendah terdapat pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar 43,79%.

FA Detail menunjukkan masih adanya akun dan item kegiatan yang belum terealisasi penuh. Namun, laporan sumber tidak menjelaskan secara spesifik penyebab keterlambatan atau hambatan setiap kegiatan. Oleh karena itu, penyebab rinci perlu dikonfirmasi kepada penanggung jawab kegiatan sebelum ditetapkan sebagai kendala resmi.

3.6 RENCANA TINDAK LANJUT TRIWULAN IV

- Melakukan reviu terhadap sisa pagu per kegiatan, komponen, akun, dan item belanja untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kerja serta kebutuhan riil sampai akhir tahun.
- Menyusun jadwal percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan/layanan yang masih dapat dilaksanakan pada Triwulan IV, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan dan pengelolaan keuangan negara.
- Mengutamakan pemantauan kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang tingkat realisasinya sebesar 43,79%, termasuk validasi produk, sertifikasi, dan kegiatan teknis terkait sesuai rincian FA Detail.
- Memonitor realisasi belanja pegawai, barang, dan perjalanan dinas secara berkala serta mengantisipasi potensi pagu tidak terserap atau kebutuhan revisi anggaran berdasarkan data aktual.
- Mengadakan evaluasi realisasi secara mingguan/bulanan bersama penanggung jawab kegiatan dan mendokumentasikan alasan deviasi antara rencana dan realisasi.
- Menggabungkan data keuangan FA Detail dengan data capaian fisik/output dari unit teknis agar penilaian kinerja mencakup aspek keuangan dan aspek keluaran kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sampai dengan 30 September 2026, SPPMHKP Merauke memiliki pagu revisi sebesar Rp3.565.698.000 dengan realisasi kumulatif Rp2.265.705.052 atau 63,54%, serta sisa anggaran Rp1.299.992.948. Program Dukungan Manajemen mencapai realisasi 64,62%, sementara Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mencapai 43,79%.

Untuk meningkatkan kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi, pemantauan berkala terhadap sisa pagu, serta koordinasi antara pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan. Penilaian capaian kinerja fisik perlu dilengkapi dengan data output/indikator kinerja yang tidak tercantum dalam FA Detail.

4.2 Rekomendasi

• Melakukan rekonsiliasi data kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2026.

• Melengkapi bukti dukung capaian setiap indikator kinerja.

• Memperkuat monitoring pelaksanaan kegiatan agar target kinerja tahunan dapat dicapai.

• Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang memiliki tingkat realisasi rendah.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Merauke pada Triwulan II Tahun 2026 berjalan dengan baik. Meskipun sebagian indikator kinerja masih dalam proses pengukuran, berbagai kegiatan pendukung telah dilaksanakan sesuai rencana kerja dan diharapkan dapat mendukung pencapaian target tahunan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
2. Manual Indikator Kinerja Tahun 2026.
3. Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2026.
4. Data dukung kegiatan.
5. Dokumentasi kegiatan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Somingan**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini	**Somingan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	72
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks))	82,5
		6	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	77
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)	77
		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)	89

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke	**3,297,717,000**
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	**111,981,000**
3	Manajemen Mutu	**73,000,000**
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Tahun 2026		**3,482,698,000**

Jakarta, 17 Juni 2026

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Ditandatangani Secara Elektronik

Somingan



MANUAL INDIKATOR KINERJA 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja tahun 2026 disusun untuk menjadi arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja organisasi.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggung jawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Merauke, Januari 2026

Kepala

Slamet Andriyanto, S.Si, M.Si

Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	**IK 1 / IKS. 01.01**
Sasaran :	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan
Indikator Kinerja :	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)
Deskripsi :	Definisi : ▪ Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. ▪ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. ▪ Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. ▪ Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: ▪ 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) ▪ 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
	Formula : $\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$ A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB F = Persentase Unit Usaha menerapakn CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk. xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*) **) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*
Satuan Pengukuran:	%
Tingkat Validitas:	**(X) Output Tk. Kendali Rendah** | ( ) Output Tk. Kendali Tinggi | ( ) Outcome
Sumber Data :	**Pusat Mutu Produksi Primer**
Jenis Perhitungan Data :	( ) Akumulasi | ( ) Rata-Rata | **(X) Nilai Posisi Akhir**
Metode Cascading:	(**X**) **Direct** | ( ) Non Direct
Polarisasi :	**(X) Maximize** | ( ) Minimize | ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan | **(X) Triwulanan** | ( ) Semesteran | ( ) Tahunan

Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	70	120	72

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 2 / IKS. 01. 02</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi :</td></tr>
<tr><td colspan="5">▪ Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
▪ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
▪ Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
▪ Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
▪ Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Formula :
$$\% X = \frac{A+B}{xn} X\ 100\%$$
A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
xn = Jumlah dari unsur pembentuk</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">(%) Persentase</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td>(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td colspan="2">(X) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td>( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>70</td><td>120</td><td>72</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 3 / IKS.01.03</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi :</td></tr>
<tr><td colspan="5">▪ Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
▪ Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
▪ Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Formula :
$$X = \frac{A+B}{2} X\ 100\%$$
X = Nilai Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Merauke
A = Nilai Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI
B = Nilai Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">Presentase</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">Pusat Mutu Pascapanen dan Pusat Mutu Produksi Primer</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td>( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td colspan="2">(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td>( ) Triwulanan</td><td>(X) Semesteran</td><td colspan="2">( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>71</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 4 / IKS. 02.04</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Presentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi :</td></tr>
<tr><td colspan="5">▪ Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional
▪ Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperolah dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi
▪ ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
▪ Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:
1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7.Persyaratan Sistem Manajemen
▪ ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
▪ Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
1. Persyaratan Umum; 2. Persyaratan Struktural; 3. Persyaratan Sumberdaya; 4. Persyaratan Proses; 5. Persyaratan Sistem Manajemen</td></tr>
<tr><td colspan="5">Formula :
$$x = \frac{A+B+C}{3} \text{ x } 100\ \%$$
x = Presentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Merauke
A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020
B = Presentase Penerapan ISO 17025
C = Presentase Nilai Penerapan Quality Manajemen System (QMS)</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">% (Persentase)</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">Pusat Manajemen Mutu</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td>(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td colspan="2">(X) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td>( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>71</td></tr>
</table>

Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke	**IK 5 / IKS. 03.05**
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke
Indikator Kinerja :	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)
Deskripsi :	Definisi : ▪ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. ▪ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
	Formula : $IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m
Satuan Pengukuran:	Nilai
Tingkat Validitas:	**(X) Output Tk. Kendali Rendah** ; ( ) Output Tk. Kendali Tinggi ; ( ) Outcome
Sumber Data :	**Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)**
Jenis Perhitungan Data :	( ) Akumulasi ; ( ) Rata-Rata ; **(X) Nilai Posisi Akhir**
Metode Cascading:	**(X) Direct** ; ( ) Non Direct
Polarisasi :	**(X) Maximize** ; ( ) Minimize ; ( ) Stabilize
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan ; ( ) Triwulanan ; **(X) Semesteran** ; ( ) Tahunan

Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	82,5

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="6">IK 6 / IKS. 03.06</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="6">Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="6">Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Deskripsi :</td><td colspan="6">Definisi :
Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi Pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada Pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Formula :
Nilai Pembangunan Integritas UPT diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :
a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)
Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit UPT disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="6">Nilai</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td colspan="2">( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="6">Inspektorat Jenderal</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td colspan="2">(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="3">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td colspan="2">( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td colspan="2">( ) Bulanan</td><td colspan="2">( ) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td>(X) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td colspan="2">Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">77</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 7 / IKS. 03.07</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi :
Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Formula :
Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.
Kategori nilai PM SAKIP yaitu:
<table>
<tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr>
<tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr>
<tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>CC</td><td>>50–60</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">Nilai</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">Inspektorat Jenderal dan BPPMHKP</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td>(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td>( ) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td colspan="2">(X) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>86,2</td></tr>
</table>

Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke	**IK 8 / IKS. 03.08**				
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke				
Indikator Kinerja :	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Persen)				
Deskripsi :	Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.				
	Formula : **Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja X 100%** **Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja**				
Satuan Pengukuran:	Persen				
Tingkat Validitas:	**(X) Output Tk. Kendali Rendah**	( ) Output Tk. Kendali Tinggi	( ) Outcome		
Sumber Data :	Inspektorat Jenderal				
Jenis Perhitungan Data :	( ) Akumulasi	**(X) Rata-Rata**	( ) Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading:	**(X) Direct**	( ) Non Direct			
Polarisasi :	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize		
Periode Pelaporan :	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan	
Tabel Data	2024		2025		2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	86

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td>IK 9 / IKS 03.09</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td>Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)</td></tr>
<tr><td>Deskripsi :</td><td>Definisi:
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</td></tr>
<tr><td></td><td>Formula :
$$\sum_{n=1}^{7}(Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr>
</table>
• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
• Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td>Nilai</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td>( ) Output Tk. Kendali Rendah | ( ) Output Tk. Kendali Tinggi | (X) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td>Kementerian Keuangan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td>( ) Akumulasi | ( ) Rata-Rata | (X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td>(X) Direct | ( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td>(X) Maximize | ( ) Minimize | ( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan | ( ) Triwulanan | (X) Semesteran | ( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td>Tabel Data</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>92,1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 10 / IKS 03.10</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Nilai)</td></tr>
<tr><td>Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi:
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Formula :
NKPA level 1 didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator Kinerja Program</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2. Nilai Efektifitas Satker</td><td>45</td></tr>
<tr><td>Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr>
</table>
$$NKPA\ UE\ I = (CIKSS \times W_{CIKSS}) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$
Keterangan:
NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
NESatker : Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">Nilai</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">Kementerian Keuangan</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td>(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td colspan="2">( ) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td>(X) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>71,75</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 11 / IKS. 03.11</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi:
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Formula :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =
Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga presentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih presentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indicator ini.</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">Persen (%)</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">Biro Umum dan PBJ</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td>(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td>(X) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td colspan="2">( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>77</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Manual IK Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke</td><td colspan="5">IK 12 / IKS. 03.12</td></tr>
<tr><td>Sasaran :</td><td colspan="5">Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja :</td><td colspan="5">Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Merauke (Indeks)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Deskripsi :</td><td colspan="5">Definisi:
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
• Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
• Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP</td></tr>
<tr><td colspan="5">Formula :
Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111
Jumlah Unsur 9
Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
IKM unit pelayanan x 25</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran:</td><td colspan="5">Indeks</td></tr>
<tr><td>Tingkat Validitas:</td><td colspan="2">(X) Output Tk. Kendali Rendah</td><td colspan="2">( ) Output Tk. Kendali Tinggi</td><td>( ) Outcome</td></tr>
<tr><td>Sumber Data :</td><td colspan="5">BPPMHKP</td></tr>
<tr><td>Jenis Perhitungan Data :</td><td colspan="2">( ) Akumulasi</td><td colspan="2">( ) Rata-Rata</td><td>(X) Nilai Posisi Akhir</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading:</td><td colspan="3">(X) Direct</td><td colspan="2">( ) Non Direct</td></tr>
<tr><td>Polarisasi :</td><td colspan="2">(X) Maximize</td><td colspan="2">( ) Minimize</td><td>( ) Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan :</td><td>( ) Bulanan</td><td colspan="2">(X) Triwulanan</td><td>( ) Semesteran</td><td>( ) Tahunan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tabel Data</td><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">2025</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td><td>Realisasi</td><td>Target</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3.5</td></tr>
</table>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	09 September	068	032	649704	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,77 15 12,42	91,39	98,31 20 19,66	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	75,78 10 7,58	87,05	96,13 25 24,03	96,13	73,69	80,00%	0,00	92,11

tanggal cetak : 14-10-26 07:31:28

Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
	Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
SOMINGAN	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
DONNI	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
AZMAL FAJRI	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
SYAHRUDDIN	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
FELIKS HENDRYCK ALBERTHO PAAYS	S-1	20	0	-	10	-	5	15	-	0	0	5	40	SANGAT RENDAH
LAROJI	D-II/D-I/SMA	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
GAGAS ADIPOEANG KHATAMI	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
SITI DIAH SETIAWATI	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
HAMIDA	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
MARLINDA	D-III	25	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
EKA LILIK IRIANY	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
ELIK WIJAYANTI	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
ALFRIYANTO	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI

Search

9:5
10/14/

Resume Hasil Pengawasan Intern - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Satker	Total LHP	LHP Berstatu...	Prosentase L...	Total Jumlah ...	Total Rekome...	Prosentase R...
BALAI BESAR PPMHKP SURABAYA I	7	7	100%	33	33	100%
BALAI PPMHKP AMBON	14	13	92,86%	115	113	98.26%
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN	5	5	100%	28	28	100%
BALAI PPMHKP BANJARBARU	4	4	100%	15	15	100%
BALAI PPMHKP DENPASAR	6	6	100%	54	54	100%
BALAI PPMHKP ENTIKONG	3	3	100%	46	46	100%
BALAI PPMHKP JAKARTA	21	21	100%	170	170	100%
BALAI PPMHKP JAYAPURA	1	1	100%	13	13	100%
BALAI PPMHKP LAMPUNG	7	7	100%	49	49	100%
BALAI PPMHKP MAKASSAR	5	5	100%	20	20	100%
BALAI PPMHKP MANADO	7	7	100%	48	48	100%
BALAI PPMHKP MATARAM	5	5	100%	25	25	100%
BALAI PPMHKP MEDAN I	11	11	100%	69	69	100%
BALAI PPMHKP SEMARANG	6	6	100%	48	48	100%
BALAI PPMHKP SURABAYA II	6	6	100%	27	27	100%
BALAI PPMHKP TANJUNG PINANG	4	4	100%	58	58	100%
BALAI PPMHKP TARAKAN	5	5	100%	25	25	100%
BALAI UJI STANDAR PPMHKP JAKARTA	8	8	100%	51	51	100%
PUSAT MANAJEMEN MUTU	8	8	100%	92	92	100%
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	2	2	100%	17	17	100%
SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	125	122	97,6%	546	543	99.45%
STASIUN PPMHKP BANDA ACEH	6	6	100%	60	60	100%
STASIUN PPMHKP BANDUNG	5	5	100%	44	44	100%
STASIUN PPMHKP BATAM	8	8	100%	92	92	100%
STASIUN PPMHKP BAU-BAU	1	1	100%	3	3	100%
STASIUN PPMHKP BENGKULU	5	5	100%	41	41	100%
STASIUN PPMHKP BIMA	4	4	100%	16	16	100%
STASIUN PPMHKP CIREBON	6	6	100%	43	43	100%
STASIUN PPMHKP GORONTALO	2	2	100%	25	25	100%
STASIUN PPMHKP JAMBI	3	3	100%	33	33	100%
STASIUN PPMHKP KENDARI	3	3	100%	29	29	100%
STASIUN PPMHKP KUPANG	1	1	100%	21	21	100%
STASIUN PPMHKP LUWUK BANGGAI	4	4	100%	19	19	100%
STASIUN PPMHKP MAMUJU	3	3	100%	11	11	100%
STASIUN PPMHKP MEDAN II	9	9	100%	60	60	100%
STASIUN PPMHKP MERAK	5	5	100%	78	78	100%
STASIUN PPMHKP MERAUKE	2	2	100%	13	13	100%
STASIUN PPMHKP PADANG	5	5	100%	42	42	100%
STASIUN PPMHKP PALANGKARAYA	2	2	100%	18	18	100%
STASIUN PPMHKP PALEMBANG	4	4	100%	31	31	100%
STASIUN PPMHKP PALU	4	4	100%	23	23	100%
STASIUN PPMHKP PANGKAL PINANG	7	7	100%	48	48	100%
STASIUN PPMHKP PEKANBARU	4	4	100%	38	38	100%
STASIUN PPMHKP PONTIANAK	5	5	100%	56	56	100%
STASIUN PPMHKP SORONG	3	3	100%	42	42	100%
STASIUN PPMHKP TAHUNA	1	1	100%	8	8	100%
STASIUN PPMHKP TANJUNG BALAI ASAHAN	3	3	100%	43	43	100%
STASIUN PPMHKP TERNATE	1	1	100%	8	8	100%
STASIUN PPMHKP YOGYAKARTA	4	4	100%	25	25	100%

Kinerjaku | (2) WhatsApp Business | 2. Laporan Capaian Kinerja (LCK | SIDAK | ITJEN

ams.kkp.go.id/sidak/registrasi/laporan-hasil-pengawasan

BKN Login | SAJI - KKP | Aplikasi SKPP Terint... | SPI 2022 - Google D... | Portal Penerimaan... | Aplikasi SIAP 68 | Efektivitas PBJ BKIP... | All Bookmarks

SIDAK | Pengajuan 120 | Search...

Home | Daftar LHP | Status | Tutorial | Collapse

Daftar Register Laporan Hasil Pengawasan

Search:

ID	IDSatker	Eselon I	Unit Kerja	Jenis	Nomor LHP	Tgl Register	Objek Pengawasan	Status	Aksi
3150	649704	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	STASIUN PPMHKP MERAUKE	Evaluasi	T.91/ITJ.4/HP.430/V/2024	2024-05-17	Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik TA 2024 pada Stasiun PPMHKP Merauke	TUNTAS	Detail
2789	649704	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	STASIUN PPMHKP MERAUKE	Pemantauan	T.270/ITJ.4/HP.550/XI/2023	2023-11-23	Laporan Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2023 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Merauke, Provinsi Papua Selatan	TUNTAS	Detail

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Hak Cipta © 2022-2026 - Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan

79°F Sunny | Search | 9:02 AM 10/14/2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

Nomor : B. 3746/BPPMHKP.4/RC.610/X/2026 12 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemutahiran Data Nilai Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen Triwulan 3 Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Bersama ini terlampir kami sampaikan pemutahiran data nilai tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kepala Pusat Mutu Pascapanen,

Ditandatangani Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan:
1. Plt.Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1
Nomor : B. 3746/BPPMHKP.4/RC.610/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

DAFTAR PEJABAT YANG DITUJU

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I
3. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung
5. Kepala Balai PPMHKP Jakarta
6. Kepala Balai PPMHKP Semarang
7. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II
8. Kepala Balai PPMHKP Entikong
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru
11. Kepala Balai PPMHKP Tarakan
12. Kepala Balai PPMHKP Denpasar
13. Kepala Balai PPMHKP Mataram
14. Kepala Balai PPMHKP Makassar
15. Kepala Balai PPMHKP Manado
16. Kepala Balai PPMHKP Ambon
17. Kepala Balai PPMHKP Jayapura
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh
19. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II
20. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun PPMHKP Padang
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang
25. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak
29. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon
31. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai
39. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari
40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau
41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo
42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna
43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate
44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong
45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

a.n. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kepala Pusat Mutu Pascapanen,

Ditandatangani Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2
Nomor : B. 3746 /BPPMHKP.4/RC.610/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

A. PEMUTAHIRAN DATA NILAI TINGKAT EFEKTIFITAS SERTIFIKASI PASCAPANEN TRIWULAN 3 TAHUN 2026

No	UPT	Target	TE SKP TW3	TE SKP s.d. TW3	TE HACCP TW3	TE HACCP s.d. TW3	TE SPDI TW3	TE SPDI s.d. TW3	Nilai Capaian IKU UPT TW3	Nilai Capaian IKU UPT s.d. TW3
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72	85,00	86,30	92,67	93,16	77,40	79,97	85,02	86,48
2	Balai PPMHKP Ambon	72	79,44	85,12	85,00	92,53	75,00	70,83	79,81	82,83
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72	92,22	87,93	70,84	84,44	85,00	78,33	82,69	83,57
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72	93,01	95,81	95,22	96,57	95,20	85,63	94,48	92,67
5	Balai PPMHKP Denpasar	72	91,58	93,22	92,50	92,60	91,90	80,63	91,99	88,82
6	Balai PPMHKP Entikong	72	92,22	88,15	73,34	75,37	95,10	81,70	86,89	81,74
7	Balai PPMHKP Jakarta	72	85,83	89,20	87,33	90,64	92,50	90,45	88,55	90,10
8	Balai PPMHKP Jayapura	72	74,45	87,22	74,45	74,08	87,50	70,83	78,80	77,38
9	Balai PPMHKP Lampung	72	92,66	88,67	99,33	96,45	75,00	75,00	89,00	86,70
10	Balai PPMHKP Makassar	72	93,06	93,35	93,17	94,23	93,60	87,03	93,27	91,54
11	Balai PPMHKP Manado	72	81,67	85,29	88,19	89,33	75,00	70,83	81,62	81,82
12	Balai PPMHKP Mataram	72	95,78	94,92	93,06	95,00	75,00	75,00	87,95	88,31
13	Balai PPMHKP Medan I	72	84,29	89,21	87,11	91,35	75,00	70,83	82,13	83,80
14	Balai PPMHKP Semarang	72	87,39	89,72	88,70	91,97	79,90	80,80	85,33	87,50
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72	91,67	89,35	90,00	91,21	86,30	78,77	89,32	86,44
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72	85,56	91,02	93,33	93,24	87,50	79,17	88,80	87,81
17	Balai PPMHKP Tarakan	72	87,18	88,56	94,11	85,95	75,00	75,00	85,43	83,17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT	Target	TE SKP TW3	TE SKP s.d. TW3	TE HACCP TW3	TE HACCP s.d. TW3	TE SPDI TW3	TE SPDI s.d. TW3	Nilai Capaian IKU UPT TW3	Nilai Capaian IKU UPT s.d. TW3
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72	82,25	85,68	66,18	73,91	87,30	83,27	78,58	80,95
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72	90,86	85,97	87,11	88,42	75,60	79,37	84,52	84,59
20	Stasiun PPMHKP Batam	72	83,67	82,02	72,00	85,36	75,00	66,67	76,89	78,02
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72	95,18	82,83	95,00	75,74	75,00	70,83	88,39	76,47
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72	89,45	82,89	88,61	91,13	87,50	87,50	88,52	87,17
23	Stasiun PPMHKP Bima	72	88,89	78,33	93,89	80,00	75,00	70,83	85,93	76,39
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72	87,50	89,91	91,39	96,02	86,80	87,27	88,56	91,06
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72	93,89	86,59	73,34	72,52	87,50	83,33	84,91	80,81
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72	92,78	91,56	73,34	73,15	87,50	79,17	84,54	81,29
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72	94,11	89,40	93,00	85,78	85,50	74,33	90,87	83,17
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72	94,06	91,12	93,23	92,69	87,50	75,00	91,59	86,27
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72	96,94	92,56	97,50	80,65	87,50	79,17	93,98	84,13
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72	94,17	79,54	95,00	79,82	87,50	83,33	92,22	80,90
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72	90,00	92,38	90,44	92,22	87,50	79,17	89,31	87,92
32	Stasiun PPMHKP Merak	72	85,33	80,46	83,67	82,49	88,60	75,37	85,87	79,44
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72	88,33	73,51	74,45	68,89	87,50	75,00	83,43	72,47
34	Stasiun PPMHKP Padang	72	73,34	79,46	73,34	71,96	87,50	75,00	78,06	75,47
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72	85,57	79,07	90,56	74,26	87,50	79,17	87,88	77,50
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72	92,78	92,04	70,56	78,52	87,50	82,99	83,61	84,52
37	Stasiun PPMHKP Palu	72	96,67	84,96	74,45	68,52	87,50	70,83	86,20	74,77
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72	86,39	93,61	84,72	93,05	75,00	66,67	82,04	84,44
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72	93,34	94,08	92,22	87,41	90,90	71,97	92,15	84,48
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72	93,89	89,94	95,56	80,37	87,50	75,00	92,32	81,77
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72	86,67	87,59	93,33	87,40	87,50	75,00	89,17	83,33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT	Target	TE SKP TW3	TE SKP s.d. TW3	TE HACCP TW3	TE HACCP s.d. TW3	TE SPDI TW3	TE SPDI s.d. TW3	Nilai Capaian IKU UPT TW3	Nilai Capaian IKU UPT s.d. TW3
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72	66,67	58,51	66,67	58,51	75,00	70,83	69,44	62,62
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72	90,30	92,90	93,11	95,48	87,50	75,00	90,30	87,79
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72	96,67	95,56	74,45	82,41	95,20	85,90	88,77	87,95
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72	92,45	89,52	94,54	97,35	87,50	85,83	91,50	90,90
46	**Pusat Mutu Pascapanen**	**72**	**88,78**	**87,22**	**86,00**	**84,94**	**84,60**	**77,66**		

Note: Nilai Capaian yg diinput di kinerjaku, untuk yang menggunakan Metode Hitung: POSISI AKHIR adalah Capaian Jan s.d Sept = (Tw.1+Tw.2+Tw.3)/3

B. Link Data Dukung

https://drive.google.com/drive/folders/1WQltRUPwPIZOLOFT4chI5YlfhbksSOHr?usp=drive_link

a.n. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kepala Pusat Mutu Pascapanen,

Ditandatangani Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1059/SJ.7/PL.410/X/2026

Yth. :
1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 12 Oktober 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi **SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)** merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** beserta perubahannya.
2. Hasil rekapitulasi capaian IKU persentase RUP terumumkan dari **160 (seratus enam puluh) satuan kerja pengelola DIPA aktif** sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan III sampai dengan waktu *cut off* tanggal **8 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB** adalah sebesar **99,85%** (daftar rekapitulasi terlampir).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berdasarkan data sesuai dengan hasil rekapitulasi capaian IKU RUP Triwulan III Tahun Anggaran 2026, masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum mencapai 100% pengisian RUP. Diminta agar segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran sehingga capaian IKU dapat optimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Nomor : 1059/SJ.7/PL.410/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2026 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor	Kode Eselon I	Nama Unit Eselon I	∑ Satker	Belanja Pengadaan (Rp)	Total RUP (Rp)	Selisih Belanja (Rp)	% Pengisian RUP TW-III	Target IKU TW-III	Capaian IKU TW-III	Keterangan Capaian
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	96,882,124,000	96,882,124,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
2	01	Sekretariat Jenderal	3	13,716,776,000	13,716,776,000	-	100.00%	82.00	100.00	Target capaian maksimal
3	02	Inspektorat Jenderal	1	8,895,902,000	8,895,902,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
4	08	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,39,141,387,000	1,339,141,387,000	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
5	07	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	5	87,067,348,750	87,067,348,750	-	100.00%	77.00	100.00	Target capaian maksimal
6	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,779,419,000	1,615,810,238,700	(666,180,300)	99.94%	77.00	99.94	Melebihi target capaian
7	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	9,647,942,360,800	9,641,512,557,800	(6,426,803,000)	99.93%	77.00	96.72	Melebihi target capaian
8	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	2,115,035,281,804	2,104,354,288,804	(10,680,663,000)	99.49%	77.00	99.49	Melebihi target capaian
9	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	668,769,038,301	664,895,096,301	(3,873,642,000)	99.42%	77.00	99.42	Melebihi target capaian
10	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	182,295,351,999	181,239,541,666	(1,055,810,000)	99.42%	77.00	99.42	Melebihi target capaian
TOTAL			***160***	***15,776,524,989,654***	***15,753,515,261,354***	***(23,009,728,300)***	***99.85%***	***Melebihi target capaian***		

Ditandatangani Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II
Nomor : 1059/SJ.7/PL.410/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	86,599,250,000	89,599,250,000	**100.00%**
2	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	7,282,874,000	7,282,874,000	**100.00%**
TOTAL		**96,882,124,000**	**96,882,124,000**	**100.00%**

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,716,776,000	13,716,776,000	**100.00%**
2	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,494,073,000	8,464,073,000	**100.00%**
3	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	273,608,200,000	273,608,200,000	**100.00%**
TOTAL		**295,819,049,000**	**295,819,049,000**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	INSPEKTORAT JENDERAL	8,895,902,000	8,895,902,000	**100.00%**
TOTAL		**8,895,902,000**	**8,895,902,000**	**100.00%**

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	20,652,073,000	20,652,073,000	**100.00%**
2	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	26,313,105,000	26,313,105,000	**100.00%**
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	25,438,501,000	25,438,501,000	**100.00%**
4	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	26,056,233,000	26,056,233,000	**100.00%**
5	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,240,681,475,000	1,240,681,475,000	**100.00%**
TOTAL		**1,339,141,387,000**	**1,339,141,387,000**	**100.00%**

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 5 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG	3,529,457,000	3,529,457,000	**100.00%**
2	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG	5,118,003,000	5,118,003,000	**100.00%**
3	BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR	2,617,680,000	2,617,680,000	**100.00%**
4	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	73,384,537,750	73,384,537,750	**100.00%**
5	BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG	2,417,671,000	2,417,671,000	**100.00%**
TOTAL		**87,067,348,750**	**87,067,348,750**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,094,321,000	21,094,321,000	**100.00%**
2	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA	15,234,749,000	15,234,749,000	**100.00%**
3	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	8,923,976,000	8,923,976,000	**100.00%**
4	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	9,677,902,000	9,677,902,000	**100.00%**
5	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	**100.00%**
6	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,599,397,000	18,599,397,000	**100.00%**
7	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	6,569,187,000	6,569,187,000	**100.00%**
8	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN CILACAP	15,695,186,000	15,695,186,000	**100.00%**
9	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,336,525,000	20,336,525,000	**100.00%**
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	**100.00%**
11	PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO	21,040,598,000	21,040,598,000	**100.00%**
12	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	9,766,944,000	9,766,944,000	**100.00%**
13	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK	6,915,925,000	6,915,925,000	**100.00%**
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,413,455,296,000	1,413,195,868,700	**99.98%**
15	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	13,807,259,000	13,097,506,000	**94.86%**
TOTAL		**1,616,779,419,000**	**1,615,810,238,700**	**99.94%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,904,204,000	1,904,204,000	**100.00%**
2	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	4,275,043,000	4,275,043,000	**100.00%**
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,165,692,000	2,165,692,000	**100.00%**
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,799,006,000	1,799,006,000	**100.00%**
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	**100.00%**
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,847,978,000	3,847,978,000	**100.00%**
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	**100.00%**
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	4,975,769,000	4,975,769,000	**100.00%**
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	106,421,616,000	106,421,616,000	**100.00%**
10	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,037,402,000	2,037,402,000	**100.00%**
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	**100.00%**
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	76,509,317,000	76,509,317,000	**100.00%**
13	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29,534,148,000	29,534,148,000	**100.00%**
14	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,412,138,000	8,412,138,000	**100.00%**
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	277,757,594,000	277,757,594,000	**100.00%**
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3,181,747,000	3,181,747,000	**100.00%**
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3,536,779,000	3,536,779,000	**100.00%**
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	**100.00%**
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	367,160,664,000	367,160,664,000	**100.00%**
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	43,638,195,000	43,638,195,000	**100.00%**
21	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	**100.00%**
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5,685,809,000	5,777,523,000	**101.61%**
23	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	8,685,660,211,800	8,679,142,645,800	**99.92%**
24	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,888,215,000	2,884,264,000	**99.86%**
TOTAL		**9,647,942,360,800**	**9,641,512,557,800**	**99.93%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,587,185,000	1,587,185,000	**100.00%**
2	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,271,802,000	5,271,802,000	**100.00%**
3	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,196,990,000	1,196,990,000	**100.00%**
4	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,260,034,000	13,260,034,000	**100.00%**
5	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,861,393,000	5,861,393,000	**100.00%**
6	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	14,438,756,000	14,438,756,000	**100.00%**
7	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	420,979,853,701	420,979,853,701	**100.00%**
8	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	3,778,653,000	3,778,653,000	**100.00%**
9	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	2,230,584,600	2,230,584,600	**100.00%**
10	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	1,677,362,000	1,677,362,000	**100.00%**
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,853,387,000	2,853,387,000	**100.00%**
12	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,050,784,000	1,050,784,000	**100.00%**
13	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	32,647,914,000	32,647,914,000	**100.00%**
14	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,184,129,000	5,184,129,000	**100.00%**
15	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	752,397,000	752,397,000	**100.00%**
16	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	1,933,287,000	1,933,287,000	**100.00%**
17	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	2,764,180,000	2,764,180,000	**100.00%**
18	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,136,163,000	3,136,163,000	**100.00%**
19	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	3,905,239,000	3,905,239,000	**100.00%**
20	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,622,295,000	4,622,295,000	**100.00%**
21	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	2,374,487,000	2,374,487,000	**100.00%**
22	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,008,432,000	1,008,432,000	**100.00%**
23	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	1,852,257,000	1,852,257,000	**100.00%**
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,439,233,000	2,439,233,000	**100.00%**
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	2,216,173,000	2,216,173,000	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,729,828,000	2,729,828,000	**100.00%**
27	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,343,214,000	1,343,214,000	**100.00%**
28	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	3,906,227,000	3,906,227,000	**100.00%**
29	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,739,060,000	1,739,060,000	**100.00%**
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	12,459,990,000	12,459,990,000	**100.00%**
31	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	835,677,000	835,677,000	**100.00%**
32	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,007,079,000	6,007,079,000	**100.00%**
33	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	40,317,914,000	40,317,914,000	**100.00%**
34	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,073,283,000	12,073,283,000	**100.00%**
35	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,078,558,000	3,078,558,000	**100.00%**
36	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	2,618,683,000	2,618,683,000	**100.00%**
37	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,948,436,000	4,948,436,000	**100.00%**
38	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,523,434,000	27,523,434,000	**100.00%**
39	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	566,529,000	566,529,000	**100.00%**
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	2,308,281,000	2,308,281,000	**100.00%**
41	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,028,502,000	1,028,502,000	**100.00%**
42	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	6,261,373,000	2,387,431,000	**38.13%**
TOTAL		**668,769,038,301**	**664,895,096,301**	**99.42%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	16,051,369,000	16,051,369,000	**100.00%**
2	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	9,154,781,000	9,154,781,000	**100.00%**
3	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,122,214,000	6,122,214,000	**100.00%**
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	**100.00%**
5	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	15,769,606,000	15,769,606,000	**100.00%**
6	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	140,988,207,000	140,988,207,000	**100.00%**
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	**100.00%**
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	25,928,799,000	25,928,799,000	**100.00%**
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	13,605,630,000	13,605,630,000	**100.00%**
10	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,537,862,000	3,537,862,000	**100.00%**
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	48,335,332,000	48,335,332,000	**100.00%**
12	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	33,005,352,000	33,005,352,000	**100.00%**
13	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	16,607,106,000	16,607,106,000	**100.00%**
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	18,975,478,000	18,975,478,000	**100.00%**
15	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1,730,218,755,804	1,720,802,244,804	**99.46%**
16	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	11,369,892,000	10,105,410,000	**88.88%**
TOTAL		**2,115,035,281,804**	**2,104,354,288,804**	**99.49%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
1	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	**100.00%**
2	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	264,756,000	264,756,000	**100.00%**
3	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR	19,533,496,000	19,533,496,000	**100.00%**
4	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI	195,176,000	195,176,000	**100.00%**
5	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM	922,433,000	922,433,000	**100.00%**
6	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	2,131,730,000	2,131,730,000	**100.00%**
7	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I	1,263,624,000	1,263,624,000	**100.00%**
8	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	**100.00%**
9	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	748,892,000	748,892,000	**100.00%**
10	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON	758,484,000	758,484,000	**100.00%**
11	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	872,480,000	872,480,000	**100.00%**
12	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	**100.00%**
13	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	**100.00%**
14	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	**100.00%**
15	BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	23,377,763,000	23,377,763,000	**100.00%**
16	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	903,509,000	903,509,000	**100.00%**
17	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK	996,270,000	996,270,000	**100.00%**
18	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA	853,490,000	853,490,000	**100.00%**
19	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE	705,319,000	705,319,000	**100.00%**
20	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA	784,570,000	784,570,000	**100.00%**
21	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	444,470,000	444,470,000	**100.00%**
22	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	160,800,000	160,800,000	**100.00%**
23	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	**100.00%**
24	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	769,468,000	769,468,000	**100.00%**
25	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satuan Kerja	Capaian IKU RUP Terumumkan - TW III		
		Belanja Pengadaan	Total RUP	% Pengisian RUP
CAPAIAN PENGISIAN RUP = 100%				
26	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	726,519,000	726,519,000	**100.00%**
27	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR	2,245,305,000	2,245,305,000	**100.00%**
28	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU	954,088,000	954,088,000	**100.00%**
29	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II	1,026,225,000	1,026,225,000	**100.00%**
30	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG	1,439,853,000	1,439,853,000	**100.00%**
31	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU	800,304,000	800,304,000	**100.00%**
32	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	**100.00%**
33	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	**100.00%**
34	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	**100.00%**
35	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	**100.00%**
36	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO	493,789,000	493,789,000	**100.00%**
37	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	621,746,000	621,746,000	**100.00%**
38	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG	753,105,000	753,105,000	**100.00%**
39	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	1,057,654,000	1,057,654,000	**100.00%**
40	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG	388,074,000	388,074,000	**100.00%**
41	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	380,500,000	380,500,000	**100.00%**
42	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	397,648,000	397,648,000	**100.00%**
43	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI	222,385,999	222,385,999	**100.00%**
44	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU	132,060,000	132,060,000	**100.00%**
45	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	**100.00%**
46	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	2,027,441,000	2,027,441,000	**100.00%**
47	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,385,470,000	99,329,660,000	**98.95%**
TOTAL		**182,295,351,999**	**181,239,541,999**	**99.42%**

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	:	2813/BPPMHKP.1/HM.450/X/2026	01 Oktober 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan III Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan III tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Target nilai SKM yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2026 adalah 89 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 3205/SJ.8/TU.140/IX/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2026 dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SKM Online oleh Kepala Pusat data dan Informasi.

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan III Tahun 2026 adalah **96,75** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,87** dan mutu pelayanan diperoleh "**A**" kategori "**Sangat Baik**". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori **"Sangat Baik"** tercatat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) atau seluruh OP lingkup BPPMHKP.
3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan mendapatkan kategori **"Sangat Baik"** tercatat sebanyak 13 (tiga belas) produk layanan atau seluruh produk layanan lingkup BPPMHKP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai SKM	Indeks
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,89	97,17
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,87	96,85
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,87	96,85
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,87	96,77
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,88	96,93
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,85	96,21
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,85	96,33
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,88	97,11
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,86	96,56

   Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U9 (Sarana dan Prasarana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

6. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh OP lingkup BPPMHKP yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan baik dan penuh tanggung jawab. Partisipasi aktif serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam penyelenggaraan survei ini menjadi kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas
Nomor : 2813/BPPMHKP.1/HM.450/X/2026
Tanggal : 01 Oktober 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2026

NO	OP	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Balai PPMHKP Banjarbaru	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	145	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	63	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Stasiun PPMHKP Ternate	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	51	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	18	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	12	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
6	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	4,00	3,99	3,99	4,00	4,00	3,99	99,83	A	Sangat Baik	211	Online
		99,76	99,64	99,76	99,76	100,00	99,76	99,76	100,00	100,00						
7	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	3,97	3,97	3,97	4,00	3,97	4,00	4,00	3,99	99,65	A	Sangat Baik	32	Online
		100,00	100,00	99,22	99,22	99,22	100,00	99,22	100,00	100,00						
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	3,96	3,96	3,93	4,00	3,98	99,50	A	Sangat Baik	28	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	99,11	99,11	99,11	98,21	100,00						
9	Balai PPMHKP Mataram	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,93	3,97	3,97	3,97	3,96	99,07	A	Sangat Baik	30	Online
		99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	98,33	99,17	99,17	99,17						
10	Balai PPMHKP Makassar	3,97	3,96	3,96	3,95	3,97	3,95	3,95	3,95	3,95	3,96	98,93	A	Sangat Baik	213	Online
		99,18	99,06	98,94	98,71	99,18	98,83	98,83	98,83	98,83						
11	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,96	3,96	3,96	3,95	3,95	3,95	3,96	3,95	3,95	3,95	98,85	A	Sangat Baik	77	Online
		99,03	99,03	99,03	98,70	98,70	98,70	99,03	98,70	98,70						
12	Balai PPMHKP Surabaya II	3,98	3,97	3,98	3,97	3,98	3,86	3,88	3,97	3,87	3,94	98,55	A	Sangat Baik	119	Online
		99,58	99,37	99,58	99,37	99,58	96,43	97,06	99,37	96,64						
13	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,85	4,00	3,92	3,77	4,00	3,92	3,92	4,00	3,85	3,91	97,86	A	Sangat Baik	13	Online
		96,15	100,00	98,08	94,23	100,00	98,08	98,08	100,00	96,15						
14	Stasiun PPMHKP Medan II	3,90	3,90	3,91	3,90	3,91	3,90	3,90	3,92	3,91	3,90	97,61	A	Sangat Baik	78	Online
		97,44	97,44	97,76	97,44	97,76	97,44	97,44	98,08	97,76						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

15	Stasiun PPMHKP Padang	3,90	3,90	3,80	3,70	4,00	3,90	4,00	3,90	4,00	3,90	97,50	A	Sangat Baik	10	Online
		97,50	97,50	95,00	92,50	100,00	97,50	100,00	97,50	100,00						
16	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,95	3,93	3,93	3,95	3,93	3,83	3,85	3,85	3,83	3,90	97,41	A	Sangat Baik	60	Online
		98,75	98,33	98,33	98,75	98,33	95,83	96,25	96,25	95,83						
17	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,89	3,88	3,88	3,89	3,88	3,85	3,87	3,92	3,88	3,88	97,08	A	Sangat Baik	121	Online
		97,31	97,11	96,90	97,31	97,11	96,28	96,69	97,93	97,11						
18	Balai PPMHKP Entikong	3,99	3,94	3,94	3,81	3,80	3,91	3,72	3,90	3,93	3,88	97,06	A	Sangat Baik	69	Online
		99,64	98,55	98,55	95,29	94,93	97,83	93,12	97,46	98,19						
19	Stasiun PPMHKP Kupang	3,89	3,89	3,90	3,86	3,88	3,88	3,87	3,86	3,85	3,87	96,85	A	Sangat Baik	166	Online
		97,14	97,14	97,44	96,54	96,99	96,99	96,69	96,54	96,23						
20	Balai PPMHKP Ambon	3,87	3,89	3,86	3,86	3,88	3,88	3,86	3,87	3,88	3,87	96,78	A	Sangat Baik	76	Online
		96,71	97,37	96,38	96,38	97,04	97,04	96,38	96,71	97,04						
21	Stasiun PPMHKP Kendari	3,86	3,84	3,88	3,82	3,86	3,89	3,88	3,93	3,86	3,87	96,73	A	Sangat Baik	57	Online
		96,49	96,05	96,93	95,61	96,49	97,37	96,93	98,25	96,49						
22	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,92	3,92	3,87	3,82	3,92	3,82	3,79	3,84	3,84	3,86	96,49	A	Sangat Baik	38	Online
		98,03	98,03	96,71	95,39	98,03	95,39	94,74	96,05	96,05						
23	Pusat Manajemen Mutu	4,00	3,67	3,67	4,00	3,83	3,83	3,67	4,00	4,00	3,85	96,30	A	Sangat Baik	6	Online
		100,00	91,67	91,67	100,00	95,83	95,83	91,67	100,00	100,00						
24	Balai PPMHKP Denpasar	3,86	3,83	3,85	3,85	3,87	3,83	3,86	3,87	3,86	3,85	96,28	A	Sangat Baik	216	Online
		96,41	95,83	96,30	96,18	96,64	95,72	96,41	96,64	96,41						
25	Balai PPMHKP Medan I	3,88	3,87	3,88	3,87	3,87	3,79	3,80	3,88	3,71	3,84	95,93	A	Sangat Baik	75	Online
		97,00	96,67	97,00	96,67	96,67	94,67	95,00	97,00	92,67						
26	Stasiun PPMHKP Bandung	3,87	3,80	3,87	3,87	3,87	3,87	3,80	3,87	3,73	3,84	95,93	A	Sangat Baik	15	Online
		96,67	95,00	96,67	96,67	96,67	96,67	95,00	96,67	93,33						
27	Stasiun PPMHKP Merauke	3,83	3,89	3,83	3,83	3,78	3,78	3,89	3,89	3,78	3,83	95,83	A	Sangat Baik	18	Online
		95,83	97,22	95,83	95,83	94,44	94,44	97,22	97,22	94,44						
28	Balai PPMHKP Balikpapan	3,85	3,76	3,93	3,73	3,85	3,71	3,78	3,93	3,93	3,83	95,73	A	Sangat Baik	41	Online
		96,34	93,90	98,17	93,29	96,34	92,68	94,51	98,17	98,17						
29	Balai UJi Standar PPMHKP Jakarta	3,86	3,83	3,78	3,79	3,82	3,83	3,82	3,85	3,82	3,82	95,53	A	Sangat Baik	120	Online
		96,46	95,83	94,58	94,79	95,42	95,63	95,42	96,25	95,42						
30	Stasiun PPMHKP Palembang	3,89	3,93	3,79	3,86	3,68	3,64	3,86	3,86	3,64	3,79	94,84	A	Sangat Baik	28	Online
		97,32	98,21	94,64	96,43	91,96	91,07	96,43	96,43	91,07						
31	Stasiun PPMHKP	3,84	3,77	3,78	3,78	3,79	3,78	3,79	3,82	3,75	3,79	94,75	A	Sangat Baik	73	Online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Sorong	95,89	94,18	94,52	94,52	94,86	94,52	94,86	95,55	93,84						
32	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,70	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,90	3,80	3,70	3,79	94,72	A	Sangat Baik	10	Online
		92,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	97,50	95,00	92,50						
33	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,87	3,74	3,70	3,87	3,91	3,78	3,70	3,74	3,78	3,79	94,69	A	Sangat Baik	23	Online
		96,74	93,48	92,39	96,74	97,83	94,57	92,39	93,48	94,57						
34	Balai PPMHKP Jakarta	3,85	3,77	3,81	3,85	3,81	3,68	3,77	3,79	3,70	3,78	94,50	A	Sangat Baik	47	Online
		96,28	94,15	95,21	96,28	95,21	92,02	94,15	94,68	92,55						
35	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,74	3,78	3,67	3,79	3,77	3,79	3,75	3,83	3,76	3,76	94,08	A	Sangat Baik	115	Online
		93,48	94,57	91,74	94,78	94,13	94,78	93,70	95,65	93,91						
36	Balai PPMHKP Jayapura	3,80	3,80	3,80	3,80	3,67	3,80	3,80	3,67	3,73	3,76	94,07	A	Sangat Baik	15	Online
		95,00	95,00	95,00	95,00	91,67	95,00	95,00	91,67	93,33						
37	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,71	3,71	3,71	3,71	3,86	3,71	3,71	3,86	3,86	3,76	94,05	A	Sangat Baik	7	Online
		92,86	92,86	92,86	92,86	96,43	92,86	92,86	96,43	96,43						
38	Stasiun PPMHKP Aceh	3,89	3,78	3,78	3,89	3,67	3,78	3,67	3,67	3,67	3,75	93,83	A	Sangat Baik	9	Online
		97,22	94,44	94,44	97,22	91,67	94,44	91,67	91,67	91,67						
39	Stasiun PPMHKP Bima	3,93	3,74	3,63	3,78	3,63	3,70	3,74	3,74	3,85	3,75	93,72	A	Sangat Baik	27	Online
		98,15	93,52	90,74	94,44	90,74	92,59	93,52	93,52	96,30						
40	Balai PPMHKP Lampung	3,76	3,79	3,74	3,82	3,79	3,74	3,76	3,65	3,65	3,75	93,63	A	Sangat Baik	34	Online
		94,12	94,85	93,38	95,59	94,85	93,38	94,12	91,18	91,18						
41	Balai PPMHKP Semarang	3,72	3,70	3,79	3,79	3,82	3,61	3,61	3,82	3,80	3,74	93,52	A	Sangat Baik	87	Online
		93,10	92,53	94,83	94,83	95,40	90,23	90,23	95,40	95,11						
42	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,77	3,74	3,69	3,69	3,83	3,63	3,71	3,71	3,80	3,73	93,25	A	Sangat Baik	35	Online
		94,29	93,57	92,14	92,14	95,71	90,71	92,86	92,86	95,00						
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,63	3,50	3,88	3,69	3,69	3,69	3,69	3,88	3,69	3,70	92,53	A	Sangat Baik	16	Online
		90,63	87,50	96,88	92,19	92,19	92,19	92,19	96,88	92,19						
44	Stasiun PPMHKP Batam	3,71	3,63	3,73	3,71	3,69	3,67	3,65	3,76	3,69	3,70	92,40	A	Sangat Baik	49	Online
		92,86	90,82	93,37	92,86	92,35	91,84	91,33	93,88	92,35						
45	Balai PPMHKP Manado	3,74	3,74	3,70	3,70	3,66	3,56	3,74	3,70	3,72	3,70	92,39	A	Sangat Baik	50	Online
		93,50	93,50	92,50	92,50	91,50	89,00	93,50	92,50	93,00						
46	Balai PPMHKP Tarakan	3,67	3,68	3,68	3,69	3,67	3,66	3,65	3,67	3,68	3,67	91,81	A	Sangat Baik	100	Online
		91,75	92,00	92,00	92,25	91,75	91,50	91,25	91,75	92,00						
47	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,68	3,68	3,76	3,60	3,64	3,64	3,64	3,64	3,68	3,66	91,56	A	Sangat Baik	25	Online
		92,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	92,00						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2026

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	4	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Bahan acuan yang disertai dengan *Certificate of Analysis* (CoA)	38	3,92	3,92	3,89	3,92	3,87	3,92	3,89	3,92	3,89	3,91	97,66	A	Sangat Baik
			98,03	98,03	97,37	98,03	96,71	98,03	97,37	98,03	97,37				
3	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1906	3,91	3,90	3,92	3,91	3,91	3,88	3,89	3,92	3,90	3,90	97,60	A	Sangat Baik
			97,85	97,57	97,89	97,73	97,74	97,09	97,21	97,93	97,43				
4	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	120	3,91	3,90	3,93	3,89	3,90	3,85	3,88	3,90	3,84	3,89	97,22	A	Sangat Baik
			97,71	97,50	98,13	97,29	97,50	96,25	97,08	97,50	96,04				
5	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (*approval number*)	6	4,00	3,67	3,67	4,00	3,83	3,83	3,67	4,00	4,00	3,85	96,30	A	Sangat Baik
			100,00	91,67	91,67	100,00	95,83	95,83	91,67	100,00	100,00				
6	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	8	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,75	3,75	3,88	3,75	3,85	96,18	A	Sangat Baik
			96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	93,75	93,75	96,88	93,75				
7	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)	204	3,86	3,84	3,85	3,84	3,84	3,80	3,81	3,84	3,81	3,83	95,83	A	Sangat Baik
			96,57	95,96	96,20	95,96	96,08	95,10	95,34	95,96	95,34				
8	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	33	3,85	3,76	3,76	3,82	3,82	3,88	3,76	3,97	3,88	3,83	95,79	A	Sangat Baik
			96,21	93,94	93,94	95,45	95,45	96,97	93,94	99,24	96,97				
9	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	91	3,86	3,86	3,77	3,80	3,77	3,77	3,84	3,78	3,77	3,80	95,02	A	Sangat Baik
			96,43	96,43	94,23	95,05	94,23	94,23	95,88	94,51	94,23				
10	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	388	3,80	3,80	3,76	3,77	3,79	3,75	3,75	3,80	3,77	3,78	94,39	A	Sangat Baik
			94,91	95,04	94,01	94,20	94,78	93,69	93,69	94,91	94,27				
11	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	106	3,79	3,74	3,72	3,71	3,77	3,75	3,73	3,75	3,77	3,75	93,68	A	Sangat Baik
			94,81	93,40	92,92	92,69	94,34	93,63	93,16	93,87	94,34				
12	Sertifikat keikutsertaan dan *final report*	21	3,81	3,71	3,62	3,62	3,76	3,71	3,71	3,76	3,76	3,72	92,99	A	Sangat Baik
			95,24	92,86	90,48	90,48	94,05	92,86	92,86	94,05	94,05				
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	3,67	3,67	3,67	3,33	3,67	3,33	3,67	3,67	3,67	3,59	89,81	A	Sangat Baik
			91,67	91,67	91,67	83,33	91,67	83,33	91,67	91,67	91,67				
Seluruh Layanan BPPMHKP		**2928**	**3,89**	**3,87**	**3,87**	**3,87**	**3,88**	**3,85**	**3,85**	**3,88**	**3,86**	**3,87**	**96,75**	**A**	**Sangat Baik**
			97,17	**96,85**	**96,85**	**96,77**	**96,93**	**96,21**	**96,33**	**97,11**	**96,56**				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.929/BPPMHKP.3/RC.610/X/2026 8 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Revisi** Capaian Indikator Kinerja "Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan" Triwulan III Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan III tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan III Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

a.n Kepala Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan,
Plh. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kiki Puspita Amalia

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat
Nomor : B. 929/BPPMHKP.3/RC.610/X/2026
Tanggal : 8 Oktober 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

a.n Kepala Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan,
Plh. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer,

Kiki Puspita Amalia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Nomor. : B.929/BPPMHKP.3/RC.610/X/2026
Tanggal. : 8 Oktober 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP TW III 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB		TE CPIB		TE CDOIB-CPOIB		TE CPPIB		TE CPIB Kapal		Realisas IKU UPT	
			TW 3	sd TW 3	TW 3	sd TW 3	TW 3	sd TW 3	TW 3	sd TW 3	TW 3	sd TW 3	TW 3	sd TW 3
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	90,00	89,81	90,00	83,67	100,00	85,56	70,00	76,67	90,00	89,78	88,00	85,10
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	90,00	81,72	70,00	70,00	70,00	73,33	75,00	79,44	70,00	70,00	75,00	74,90
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	83,67	83,50	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	86,67	85,83	76,47	76,07
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	90,00	83,11	70,00	70,67	70,00	70,00	70,00	76,67	70,00	70,00	74,00	74,09
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	90,00	70,00	76,67	90,00	83,33	90,00	76,67	90,00	90,00	86,00	83,33
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	100,00	87,00	88,33	82,22	70,00	76,11	70,00	70,00	90,00	83,33	83,67	79,73
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	72,00	77,67	70,00	76,67	99,17	86,39	70,00	70,00	90,00	76,67	80,23	77,48
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	85,00	78,33	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	83,33	71,11	72,67	68,89
9	Balai PPMHKP Balikpapan	72,00	90,00	76,67	90,00	77,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	83,33	78,00	75,47
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	90,00	83,39	70,00	77,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,56	74,00	75,39
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	90,00	93,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	74,67
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	90,00	83,67	90,00	83,67	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	90,00	82,00	79,47
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	90,00	89,63	88,33	76,44	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,67	81,67	76,55
14	Balai PPMHKP Makassar	72,00	70,00	70,33	71,00	70,67	70,00	70,00	96,67	80,00	88,75	89,03	79,28	76,01
15	Balai PPMHKP Manado	72,00	80,00	87,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	90,00	76,00	77,40
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	91,67	77,22	81,00	74,33	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	89,03	80,53	76,12
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	83,33	77,78	77,00	75,67	65,00	65,00	65,00	65,00	85,00	77,67	75,07	72,22
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	100,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,00	72,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	90,00	83,67	70,00	70,00	70,00	70,00	76,67	73,33	70,00	83,33	75,33	76,07
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	90,00	83,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,67	78,00	74,00
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	90,00	77,00	70,00	70,33	65,00	65,00	65,00	65,00	83,33	77,78	74,67	71,02
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	70,83	80,28	67,00	70,22	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	71,67	66,57	70,43
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	90,00	89,44	100,00	90,00	70,00	70,00	80,00	76,67	70,00	70,00	82,00	79,22
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	88,33	82,22	88,33	82,22	70,00	70,00	79,17	73,06	66,67	66,67	78,50	74,83
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	100,00	93,33	70,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00	85,00	77,78	77,00	74,22
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	90,00	89,44	90,00	76,67	70,00	70,00	70,00	70,00	88,33	76,11	81,67	76,44
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	81,67	70,56	68,33	66,11
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	90,00	89,17	70,00	83,33	70,00	76,11	100,00	86,67	70,00	70,00	80,00	81,06
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	85,00	84,44	66,00	72,33	85,00	77,78	65,00	65,00	65,00	65,00	73,20	72,91
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	90,00	83,67	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	65,00	65,00	73,40	71,93
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	90,00	87,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	88,33	88,06	77,67	77,01
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	90,00	82,67	90,00	76,67	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,67	82,00	75,20
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	85,00	71,67	85,00	71,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	73,00	67,67
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	88,33	83,11	72,00	71,33	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,07	72,89
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	85,00	71,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	85,00	71,67	73,00	67,67
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	65,00	65,33	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,07
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	85,00	78,33	65,00	71,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	69,00	69,00
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	88,33	76,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	88,33	82,78	77,33	73,84
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	90,00	76,67	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,67	74,00	72,67
40	Stasiun PPMHKP Bau - Bau	72,00	90,00	83,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	89,44	78,00	76,60
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	72,00	76,06	65,00	65,33	65,00	65,00	65,00	65,00	83,89	71,30	70,18	68,54
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	65,00	71,67	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	85,00	77,78	69,00	68,89
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	83,33	77,22	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	85,00	78,33	72,67	70,11
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	67,00	65,67	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	89,44	76,48	72,29	69,43
45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	65,00	67,22	65,00	66,94	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,83
	Jumlah		3793,82	**3615,44**	3347,99	**3270,72**	3174,17	**3148,61**	3182,50	**3144,17**	3568,75	**3438,72**	3413,45	**3323,53**
	%Realisasi IKU Primer		84,31	**80,34**	74,40	**72,68**	70,54	**69,97**	70,72	**69,87**	79,31	**76,42**	**75,85**	**73,86**
	% Capaian IKU Primer		118,74	**113,16**	106,29	**103,83**	94,05	**93,29**	94,30	**93,16**	110,15	**106,13**	**105,35**	**102,58**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
   Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar sampai dengan TW 3 tahun 2026 sebesar 73,86%

2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
   Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% sampai dengan TW 3 sebesar 102,58%

   Rumus (realisasi/target x 100%)= (73,86/72) x 100% = 102,58%

B. Link Drive

- Sertifikasi CPPIB
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NtSikx_ibA5ZKHYyNsy6vDgtK4427hmi/edit?gid=2020555697#gid=2020555697

- Sertifikasi CDOIB−CPOIB
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GSsCQk0feiSCVgJXiiI1ZwtOk9CqoEnS/edit?gid=162201606#gid=162201606

- Sertifikasi CPIB Kapal
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v44QPeYgdpz8ZQrKieF1AAgcsSmg_j82/edit?gid=1683590990#gid=1683590990

- Sertifikasi CBIB – CPIB
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3CBBG-0gFYWHX13jH4QCZmee_8IuknN/edit?usp=drive_link&ouid=102201443899542576304&rtpof=true&sd=true

- Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026
  https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1−E3VDI3iI15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
TRIWULAN III TAHUN 2026
(PERIODE JULI – SEPTEMBER 2026)

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
BAB II **4**
PENGUMPULAN DATA SKM **4**
2.1 Pelaksana SKM 4
2.2 Metode Pengumpulan Data 4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data 5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 5
2.5 Penentuan Jumlah Responden 6
BAB III **7**
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM **7**
3.1 Jumlah Responden SKM 7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 9
BAB IV **10**
ANALISIS HASIL SKM **10**
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 10
4.2 Rencana Tindak Lanjut 10
4.3 Tren Nilai SKM 11
BAB V **13**
KESIMPULAN **13**
LAMPIRAN **14**
1. Kuisioner Online 14
2. Hasil Pengolahan Data SKM 15
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM 16
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/72 (Diisi sesuai link kuesioner SKM UPP BPPMHKP) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juni 2026	8
2.	Pengumpulan Data	Juli – September 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2026	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Oktober 2026	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan II tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke dalam kurun waktu triwulan III tahun 2026 adalah sebanyak 18 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 11 orang.

TEBEL KREJCIE AND MORGAN

Tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 18 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	15	94%
		Perempuan	3	19%
2	Usia	<25	4	25%
		25-45	9	56%
		46-60	5	31%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	2	8%
		SMA	2	13%
		D3	1	4%
		S1	5	31%
		S2	1	4%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	1	4%
		Pelaku Usaha KKP	3	19%
		Pegawai Swasta	3	19%
		Wirausaha Non KKP	4	16%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	2	13%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	2	200%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1	6%

	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	5	31%
	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

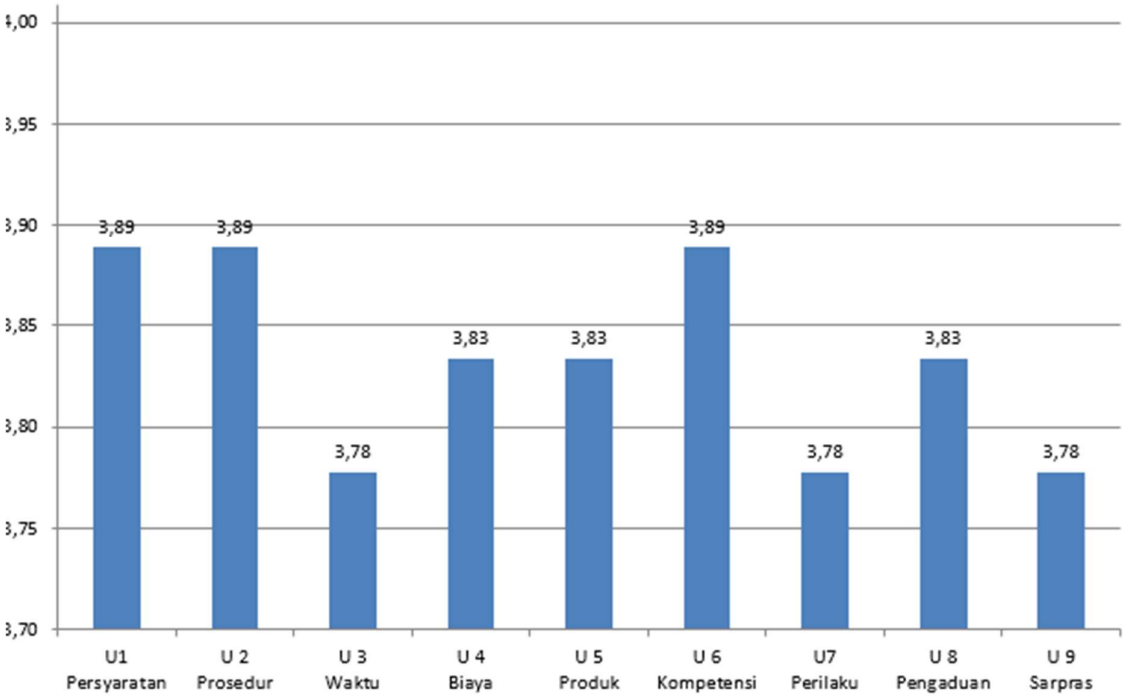
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**
IKM per unsur	**3,89**	**3,89**	**3,78**	**3,83**	**3,83**	**3,89**	**3,78**	**3,83**	**3,78**
Kategori	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
IKM Unit Layanan	**95,83 (A atau Sangat Baik)**								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

IKM per Unsur pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke
Triwulan III Tahun 2026



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Semua unsur layanan atau sembilan unsur mendapatkan nilai tinggi yang didapatkan yakni Persyaratan (U1), Prosedur (U2), Waktu (U3), dan Perilaku (U7) yaitu memperoleh nilai 3,89, sedangkan nilai 3,83 yakni : Biaya (U4), Kompetensi (U6), Pengaduan (U8) dan Sarpras (U9), nilai 3.78 dari unsur yakni: Produk (U5).

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa masukan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Pelayanan yang diberikan sudah sangatlah baik,
- Layanan yang diberikan kepada pelaku usaha sudah bisa dipahami dan dimengerti sehingga memudahkan petugas kami dalam melakukan pelayanan,
- Kedepannya tim inspeksi/inspektur mutu akan melihat secara baik dan detail dalam memberikan penilaian sehingga temuan-temuan yang diberikan untuk UPI dapat diterima oleh pelaku usaha perikanan dan mudah untuk diselesaikan/ditindak lanjuti.
- PETUGAS BPPMHKP MERAUKE SANGAT BAIK PELAYANANNYA, CEPAT, MANTAP dan OKE.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

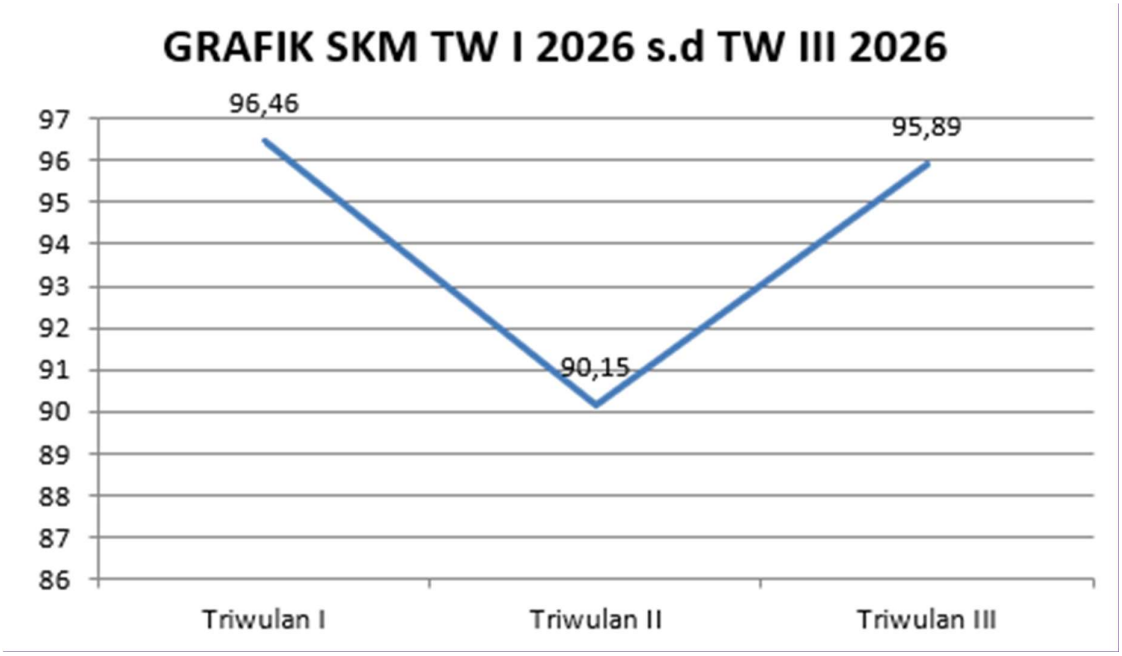
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal **Bulan Maret 2026**. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek

(kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan III 2026)			Penanggung Jawab
			Juli	**Agustus**	**September**	
1	**Persyaratan**	Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)		**√**		Tim Pelayanan Publik
2	**Biaya**	Publikasi PNBP tarif dan biaya layanan melalui media elektronik (media sosial, grup WA, dsb).	**√**			Tim Pelayanan Publik
3.	**Prilaku Pelaksana**	Menyapa setiap pengguna jasa dengan sikap yang santun dan berwibawa serta tersenyum			**√**	Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan Grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I 2026 hingga triwulan III 2026 pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama tiga periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2026, Triwulan II mulai April hingga Juni dan Triwulan III mulai Juli hingga September dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 95,83. Kemudian nilai SKM Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke menunjukkan adanya Penurunan nilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I 2026 yaitu 96,46 hingga triwulan II 2026 yaitu 90,15.
- Semua unsur layanan dengan mendapatkan nilai tertinggi yakni 3,89 hingga 3,78 yaitu Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu (U3) Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Layanan (U5), Kompetensi Pelayanan (U6), Perilaku Pelaksana (U7),dan Pengaduan (U8), dan Sarana Prasaran (U9).

Merauke, 05 Oktober 2026

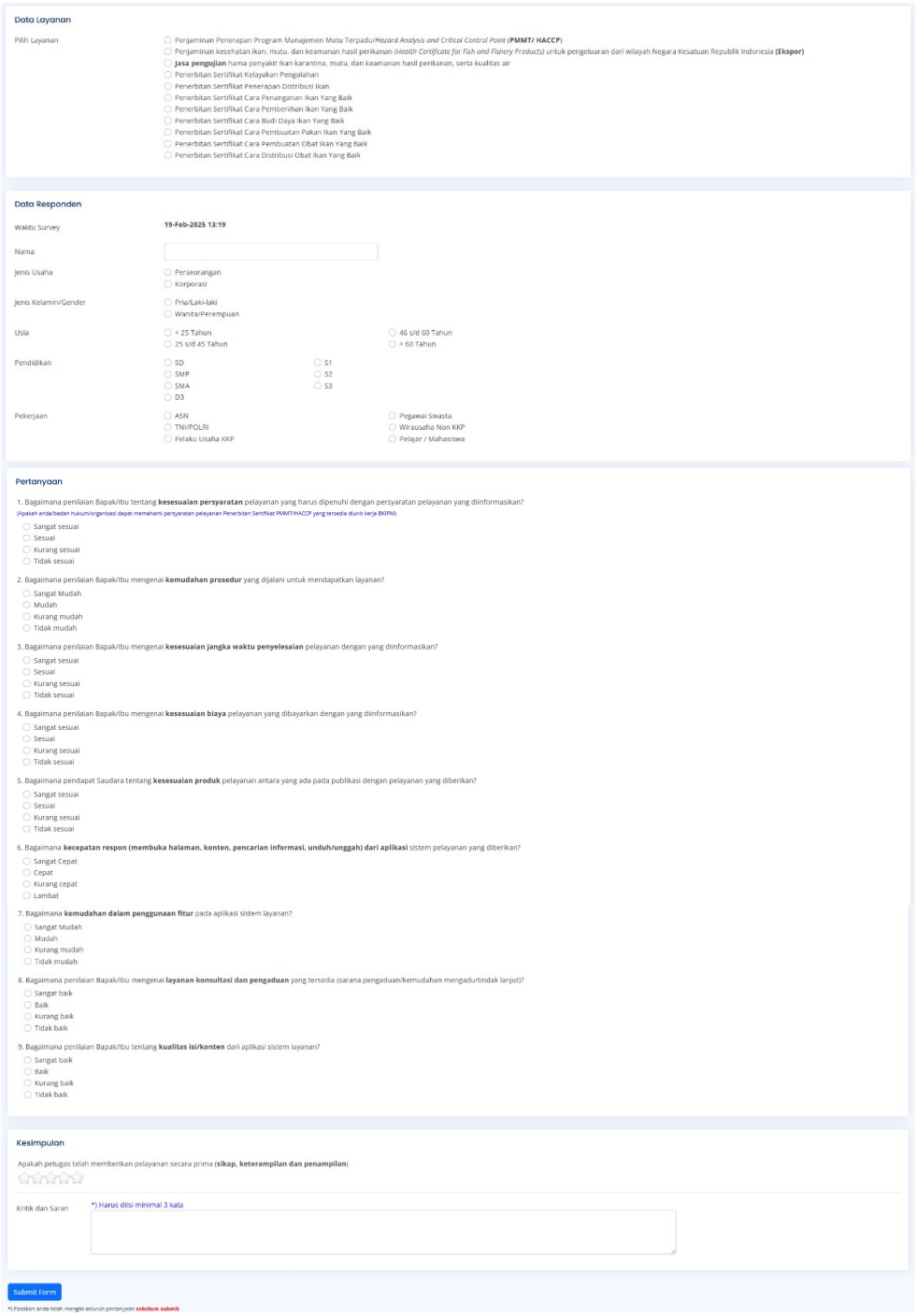
Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Somingan, S.ST.Pi

NIP. 198303022007011001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online



Data Layanan

Pilih Layanan

- Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (**PMMT/ HACCP**)
- Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan *(Health Certificate for Fish and Fishery Products)* untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **(Ekspor)**
- **Jasa pengujian** hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pemberihan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey: **19-Feb-2025 13:19**

Nama

Jenis Usaha
- Perseorangan
- Korporasi

Jenis Kelamin/Gender
- Pria/Laki-laki
- Wanita/Perempuan

Usia
- < 25 Tahun
- 25 s/d 45 Tahun
- 46 s/d 60 Tahun
- > 60 Tahun

Pendidikan
- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1
- S2
- S3

Pekerjaan
- ASN
- TNI/POLRI
- Pelaku Usaha KKP
- Pegawai Swasta
- Wirausaha Non KKP
- Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah anda/badan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diunit kerja BKIPM)
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
   - Sangat Mudah
   - Mudah
   - Kurang mudah
   - Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi** sistem pelayanan yang diberikan?
   - Sangat Cepat
   - Cepat
   - Kurang cepat
   - Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?
   - Sangat Mudah
   - Mudah
   - Kurang mudah
   - Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?
   - Sangat baik
   - Baik
   - Kurang baik
   - Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?
   - Sangat baik
   - Baik
   - Kurang baik
   - Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (**sikap, keterampilan dan penampilan**)

Kritik dan Saran — *) Harus diisi minimal 3 kata

Submit Form

*) Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan **sebelum submit**

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE

PERIODE TRIWULAN III 2026

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS	NRR PER JENIS LAYANA
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Sangat baik sekali	77,78	95,37
2	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	46-60	S1	P.UKKP	3	4	4	4	4	4	3	4	4	sangat baik dan sesuai	94,44	
3	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semakin baik dan jujur	100,00	
4	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sopan santun ramah	100,00	
5	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	jujur cepat dan akurat	100,00	
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semakin baik dan terdepan	100,00	
7	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)	L	25-45	SD	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	cepat mudah ramah	100,00	100,00
8	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	BPPMHKP MANTAP Semakin Baik	100,00	
9	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	BPPMHKP Semakin Baik	100,00	100,00
10	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)	L	25-45	S1	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Petugas sangat ramah dan cepat	100,00	96,30
11	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	L	46-60	S1	wirausaha	4	4	3	4	4	4	3	4	3	Pelayanan cukup bagus, semoga bisa tambah bagus lagi.	91,67	
12	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	L	25-45	SMA	swasta	4	4	3	3	3	4	4	3	3	Harus berkomitmen bahwa Pegawai Negeri adalah pelayan masyarakat	86,11	
13	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	mantap semakin baik	100,00	
14	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kantor Badan Mutu Papua Selatan terdepan	100,00	
15	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	L	25-45	SMA	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sip mantab lanjutkan	100,00	
16	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	P	25-45	SMA	swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Terima kasih atas pelayanan yang terbaik	75,00	91,67
17	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	P	25-45	D3	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yang sangat baik	100,00	
18	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	L	25-45	S1	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus	100,00	
	JUMLAH NILAI PER-UNSUR					70	70	68	69	69	70	68	69	68			
	RATA-RATA PER-UNSUR					3,89	3,89	3,78	3,83	3,83	3,89	3,78	3,83	3,78	SANGAT BAIK	95,83	
	NILAI INDEKS PER-UNSUR					0,43	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,42			
	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT					95,83											

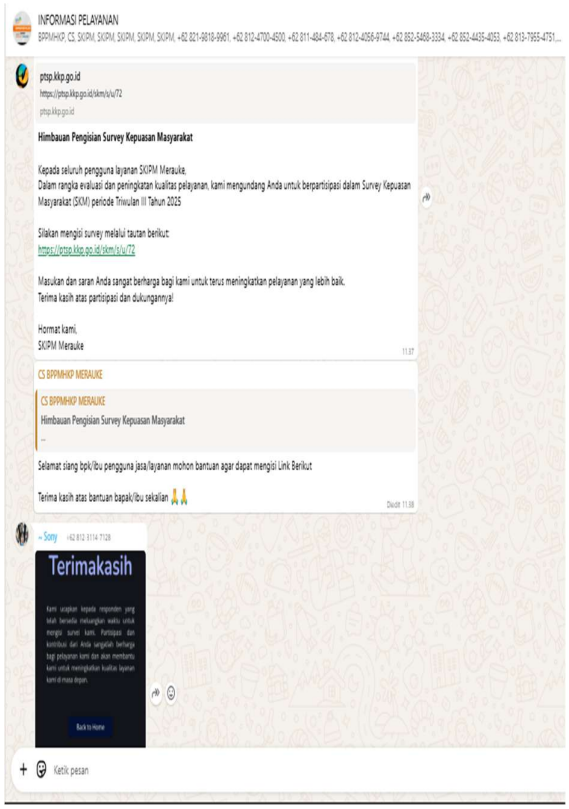
NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	7	44%
		Perempuan	4	25%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	10	63%
		46-60	1	6%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	2	0%
		SMA	2	13%
		D3	1	6%
		S1	5	31%
		S2	1	6%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	1	6%
		Pelaku Usaha KKP	3	19%
		Pegawai Swasta	3	19%
		Wirausaha Non KKP	4	25%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Proksimat/kopi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan kalakir tandarbahan acuan/kontrol paritif	0	0%
		Laporan hasil uji mutu produk perikanan	2	13%
		Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	2	200%
		Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1	6%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	5	31%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	88,64	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	88,64	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	88,64	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	90,91	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	93,18	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	90,91	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	88,64	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	90,91	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	90,91	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

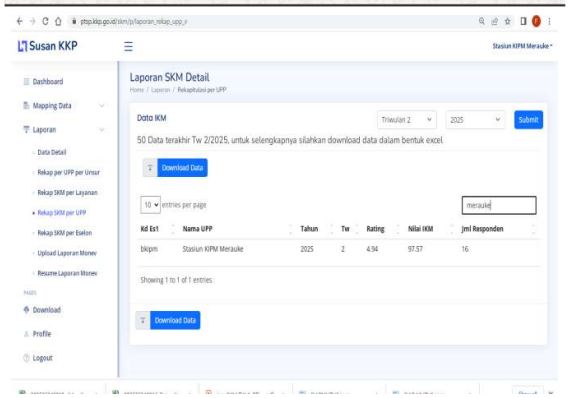
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

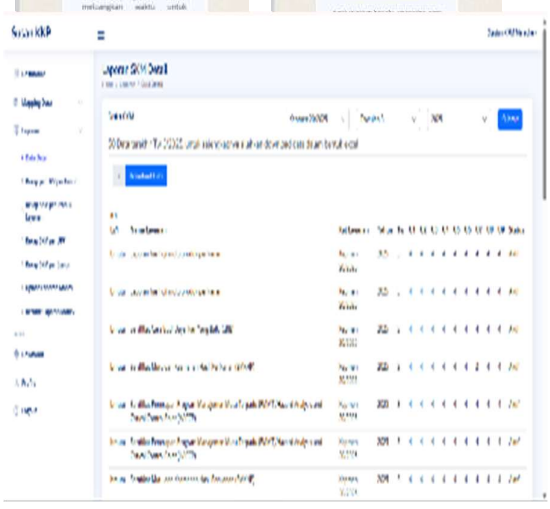


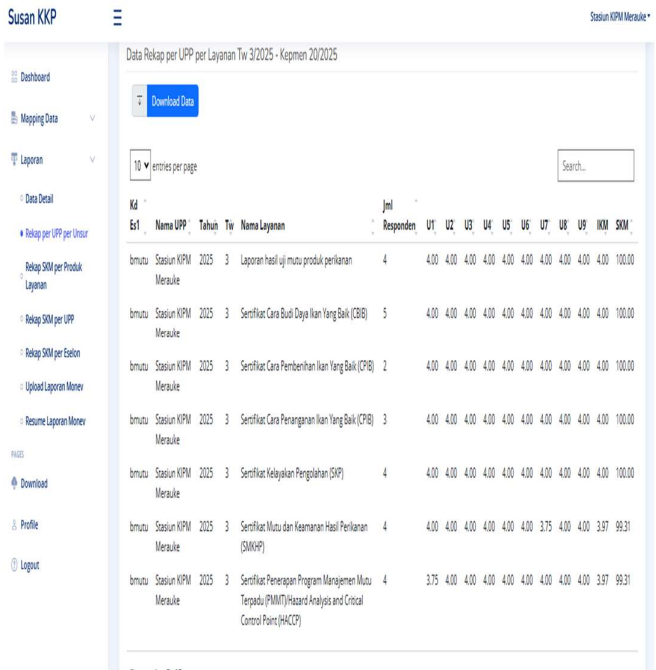












4. **Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya**

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

2026

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke periode triwulan II tahun 2026 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	**3,91**	**A (Sangat Baik)**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**3,91**	**A (Sangat Baik)**
3	Waktu Penyelesaian	**3,82**	**A (Sangat Baik)**
4	Biaya/Tarif	**3,82**	**A (Sangat Baik)**
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	**3,86**	**A (Sangat Baik)**
6	Kompetensi Pelaksana	**3,91**	**A (Sangat Baik)**
7	Perilaku Pelaksana	**3,82**	**A (Sangat Baik)**
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	**3,86**	**A (Sangat Baik)**
9	Sarana dan Prasarana	**3,82**	**A (Sangat Baik)**

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur

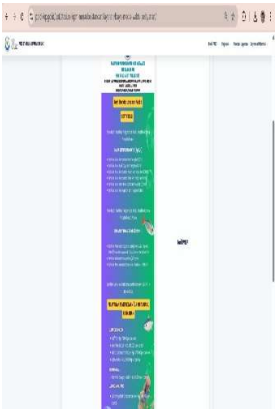
dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2026)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	**Waktu penyelesaian**	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)		√		Tim Pelayanan Publik
2	**Biaya/Tarif**	Publikasi PNBP tarif dan biaya layanan melalui media elektronik (media sosial, grup WA, dsb).	√			Tim Pelayanan Publik
3.	**Prilaku Pelaksana**	Menyapa setiap pengguna jasa dengan sikap yang santun dan berwibawa serta tersenyum			√	Tim Pelayanan Publik

BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)	Sudah	Maklumat layanan, pemberian reward n punishmen kepada petugas		Tidak ada kendala
2	Publikasi PNBP tarif dan biaya layanan melalui media elektronik (media sosial, grup WA, dsb).	Sudah	Melakukan publikasi baiya layanan melalui media cetak banner, PPID dan media elektronik (IG, FB, dan X)	 	Tidak ada kendala

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)	Maklumat dan janji layanan,	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Merauke
2	Publikasi persyaratan biaya/tarif layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Melakukan publikasi biaya/tarif layanan melalui media cetak banner, PPID dan media elektronik (IG, FB, dan X)	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Merauke

06 Juli 2026

Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke



Somingan, S.ST.Pi